

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Suatu daerah pada umumnya terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah, misalnya di suatu provinsi dalam wilayah tersebut terbagi atas sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan di daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama, antara lain; sumber daya alam yang tersedia, ketersediaan modal bagi pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana infrastruktur penunjang seperti transportasi dan komunikasi, tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, tersedianya kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan teknologi.

Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat.

Otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Kewenangan untuk memanfaatkan keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping bagi hasil pajak dan non pajak, penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan.

Sumatera Selatan memiliki potensi Sumber Daya Alam utama di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan sektor pertambangan. Pada sektor pertanian, Provinsi Sumatera Selatan yang juga sebagai salah satu lumbung padi diluar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional, memiliki luas areal produksi panen lebih dari 820.000 ha untuk komoditas padi. Sementara untuk komoditas jagung, luas areal produksi mencapai lebih dari 32.000 ha, dan yang terkecil adalah komoditas kedelai, dengan luas areal produksinya kurang lebih hanya 3500 ha saja.

Selain dari sektor pertanian, Provinsi Sumatera Selatan juga termasuk salah satu provinsi yang memiliki industri pada sektor pertambangan migas dan non migas terbesardi Indonesia karena memiliki potensi kekayaan sumber daya alam pertambangan dan penggalian seperti minyak, gas alam, panas bumi (geothermal), serta batubara. yang tersebar luas di beberapa kabupaten seperti Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas. Sektor pertambangan dan penggalian yang berada di Sumatera Selatan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang telah banyak berperan diberbagai sektor perekonomian dalam negeri.

Namun apakah benar keberadaan industri pertambangan dan penggalian ini memberikan kontribusi paling besar, utamanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dibanding sektor lainnya, penulis menggunakan sampel data pada salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Lahat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Lahat mengenai Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga berlaku dengan lapangan usaha terbesar Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan 2021 sebagai berikut:

Tabel I.1 - Distribusi PDRB

Sumber: BPS Kab.Lahat (data telah diolah)

Jenis Lapangan Usaha Terbesar	Persentase PDRB
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	19,30%
Pertambangan & Penggalian	35,74%
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	13,45%
Konstruksi	8,91%

Kabupaten Lahat sebenarnya hanya terdiri 7 kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat bertambah menjadi 22 kecamatan. Kabupaten Lahat resmi dikukuhkan sebagai sebagai Daerah Tingkat II dengan PP No.1959, dan diperkuat dengan UU 6 No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat. Secara demografis, kabupaten Lahat mempunyai luas wilayah 6.586 KM². Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Lahat berbatasan dengan Kabupaten 13 Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Manna Provinsi Bengkulu, sebelah barat dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Secara astronomis Kabupaten Lahat terletak antara 3,25 derajat sampai dengan

4,15 derajat Lintang Selatan, 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat Bujur Timur. Kabupaten Lahat beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara maksimum 30,47 derajat celsius dan rata-rata suhu udara minimum 22,16 derajat celsius. Kabupaten Lahat terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Pulau Pinang, Gumai Ulu, Pagar Gunung, Kota Agung, Tanjung Tebat, Mulak Ulu, Pajar Bulan, Jarai, Muara Payang, Gumay Talang, Pseksu, Kikim Timur, Kikim Barat, Kikim Selatan, Kikim Tengah, Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Dipilih Kecamatan Mulak Ulu dan Kecamatan Merapi Timur sebagai lokasi penelitian.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Suatu daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu modal dasar yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat adalah produksi pada sektor pertanian tanaman pangan yang terdiri dari padi jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai dan kacang tanah,

mencapai lebih dari 86.210 ton pada tahun 2020, dan untuk produksi pada sektor tanaman perkebunan rakyat yang terdiri dari kopi, karet, kelapa sawit, kakao dan kelapa, mencapai lebih dari 73.211 ton pada tahun 2020. Untuk Sektor pertanian Kabupaten Lahat dapat diambil contoh perusahaan BUMN PT. Perkebunan XI (Persero) di kabupaten Lahat yang menghasilkan produk utama gula serta dalam bidang pertambangan PT. Putra Hulu Lematang yang memproduksi batu bara mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lahat menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.2. Hasil PAD

PAD	2017
Pajak	37008535966
Hasil Restribusi Daerah	5315837735
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah	6931888290
Lain - lain PAD yang sah	115238915559
Jumlah	164495177550

Sumber: BPS Kab.Lahat (data telah diolah)

Pada tabel diatas, menggambarkan fenomena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lahat pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat bahwa pada sector pajak memiliki nilai sangat berpengaruh terhadap PAD yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul " Analisis kontribusi sektor industri pertanian dan sektor pertambangan terhadap PAD dan APBD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 - 2021"

1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah keterkaitan besaran kontribusi Sektor Industri Pertanian dan Sektor Pertambangan yang

merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang tercantum pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2017 – 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh sektor pertanian terhadap PAD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 -2021?
2. Bagaimanakah pengaruh sektor pertambangan terhadap PAD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 -2021?
3. Bagaimanakah pengaruh sektor pertanian dan pertambangan terhadap PAD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 -2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaruh sektor pertanian terhadap PAD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 -2021.
2. Untuk mengkaji pengaruh sektor pertambangan terhadap PAD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 -2021
3. Untuk mengkaji pengaruh sektor pertanian dan pertambangan terhadap PAD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 -2021,

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan baik secara teoritismaupun praktis antara lain adalah:

1. Manfaat teoritis

penelitian yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bukti empiris serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Manajemen Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan mengenai potensi daerah yang masih bisa dioptimalkan untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai otonomi daerah

